

BAB III

PASAR EROPA SEBAGAI TUJUAN INVESTASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perubahan zaman pada terakhir ini terjadi suatu pergeseran kekuatan ekonomi dunia, kekuatan-kekuatan ekonomi ini membuat *community* atau forum di hampir setiap regional yaitu guna untuk memperkuat perekonomian dan perusahaan multinasional beraliansi untuk berkerjasama dalam menghadapi perekonomian moderen dan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, forum atau *community* perekonomian regional ini diantaranya seperti: AEC (ASEAN *Economic Community*), EEC (*European Economic Community*) EFTA (*European free trade area*) AFTA (ASEAN *free trade area*, NAFTA (*north american free trade area*). APEC (*Asia pacific economic cooperation*)

forum-forum ekonomi regional ini telah merubah tatanan perekonomian dunia setelah perang dingin rusia atau pada saat itu masih dikenal sebagai uni soviet, Amerika, Eropa dan Jepang melakukan aliansi untuk mengakhiri *Cold war* dan membangun kerjasama ekonomi (Gilpin, 2001) forum ekonomi di Eropa merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia, dan saat ini masih menjadi sebuah acuan bagi kelompok lain dalam meningkatkan kerjasama regional. Dalam integrasi ekonomi tersebut Eropa berhasil menyelesaikan beberapa kebijakan perdagangan luar negeri dalam kerjasama ekonomi seperti dicapainya pembentukan kawasan *free trade*, non-tarif untuk negara-negara tertentu dan pasar tunggal Eropa.

Eropa merupakan gabungan dari 28 negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 507,4 juta (Europa, 2017) 28 negara anggota tersebut merupakan memiliki GDP atau pendapatan perkapital yang tinggi sehingga bisa dikatakan sebagai negara yang maju oleh kerana itu EU adalah salah satu ladang untuk perusahaan-perusahaan multinasional seperti CV Amarta.

Gambaran Umum Hubungan Kerjasama Indonesia – Eropa

A. kebijakan Standar produk kayu dan regulasi ekspor Eropa

Kebijakan pemerintah Eropa mengenai Standar dan regulasi ekspor produk kayu merupakan menjadi momok bagi eksportir kebijakan yang ketat ini menjadi tantangan bagi calon eksportir, semakin besar tantangan yang dihadapi semakin juga peluang yang akan di raih. (santoso, 2017) kebijakan ini diberlakukan adalah dengan tujuan untuk menjaga ekosistem lingkungan di negara-negara pengekspor seperti perusahaan di Indonesia, pemerintah Eropa memiliki tugas mengaur perdagangan yang adil .

FLEGT-VPA adalah kebijakan yang dibuat Eropa mengenai isu *illegal logging*. Sebagai negara konsumen kayu, Eropa telah mengalami dampak langsung *illegal logging*, dimana hampir sebagian besar kayu atau produk kayu yang masuk di Eropa diestimasi ilegal. Sedang hal ini bertentangan dengan komitmen Eropa untuk melaksanakan program yang peduli lingkungan. Sadar bahwa *illegal logging* terus berlangsung karena adanya pasar, selaku negara konsumen Eropa kemudian menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara

produsen kayu seperti Indonesia.

FLEGT-VPA adalah singkatan dari *Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement* (Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan) dan merupakan perjanjian bilateral bersifat sukarela antara Eropa dan negara-negara produsen kayu dalam mengatasi *illegal logging* melalui mekanisme penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan. Mekanisme dari perjanjian ini yaitu upaya penegakan hukum untuk tindak pelanggaran *illegal logging*, tata kelola bidang lingkungan selama proses pemanfaatannya yang bernilai ekonomis dan perdagangan. Bidang lingkungan dengan sasaran kehutanan, dan bidang perdagangan dengan sasaran proses ekspor impor kayu yang legal (kerjasama Eropa dengan Indonesia dalam mengatasi *illegal logging* dalam kerangka kerjasama FLEGT-VPA (Sofyan, 2014)

Perusahaan yang telah lolos dari verifikasi akan mendapatkan peluang yang sangat luas yaitu bisa meajajakan produk-produknya ke 28 negara di Eropa hal ini tentu menjadi semangat tersendiri bagi perusahaan multinasional. Ada prinsipnya, untuk memasuki pasar Eropa perlu diperhatikan: (a) persyaratan wajib berupa regulasi yang ditetapkan Uni Eropa atau regulasi tambahan dari masing-masing negara; (b) standar umum/ sukarela yang telah diterapkan pelaku usaha sejenis (pesaing) agar produk dapat bersaing di pasar dan (c) standar ceruk pasar (*niche market*) yaitu kelompok kecil dengan pangsa pasar kecil namun memiliki kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar. (Santoso, 2017)

1. Kejolak perekonomian dan politik Eropa

Perekonomian Eropa mengalami naik-turun dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu pada tahun 1998 terdapat krisis yang sangat besar di barat hal tersebut dikarenakan oleh tidak percayanya masyarakat dengan Bank sehingga masyarakat pada saat itu menarik semua uang di Bank sehingga infasi menjadi tinggi, tahun 2008 terjadi krisis ekonomi dunia, indikator tersebut dikarenakan tingginya minyak bumi, krisis kredit macet, infasi tinggi dan menyebabkan pengangguran, krisis yang melanda Yunani dan Itali juga telah menjadi zona baru mewarnai kejolakan perekonomian Eropa yang semua krisis ekonomi “merambat” ke jalur politik juga. Krisis yang terjadi di Yunani dan Itali adalah krisis karena faktor keuangan dan utang yang sangat besar dan kedua negara tersebut tidak dapat keluar dari masalah tersebut sehingga perekonomian Eropa mengalami ketidakseimbangan perekonomian dan politik (kusuma, 2013)

Dampak dengan ketidak setabilan perekonomian di kawasan Eropa menimbulkan tekanan beban tersendiri. Penurunan anggaran pemerintah, pelebaran jumlah hutang yang semakin bertambah banyak serta penyaluran hutang tidak efisien memperparah keuangan negara-negara Eropa. Tekanan fiskal tersebut berdampak melemahnya ketahanan ekonomi beberapa negara Eropa serta berkurangnya kesempatan kerja seperti yang terjadi di Yunani dan Italia.

Defisit fiskal per PDB negara-negara kawasan Eropa masih tinggi, Defisit fiskal beberapa negara Eropa jauh melebihi 3,0 persen per PDB. Pada tahun 2010 pelebaran defisit fiskal terjadi pada negara Irlandia yang mencapai 32,4

persen PDB lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 (defisit 14,3 persen PDB).
(ali, p. 2017)

2. kepentingan Perdagangan internasional Indonesia dengan Eropa dalam perpektif ekonomi-politik internasional

Pendekatan ekonomi politik ini menjelaskan hubungan timbal balik atau berkaitan antara hubungan ekonomi dan politik, yang tergambar dalam hubungan pasar dan negara. Di satu pihak, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan dan penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk sangat menentukan hakikat sistem ekonomi. Di pihak lain, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Ekonomi membentuk hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya hal ini akan merombak sistem politik sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional jaman modern pada intinya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik (yuniarti, 2013)

kementrian perdagangan luar negeri Indonesia pada era presiden Susilo bambang yudoyono melalui buku yang berjudul Penguatan Kemitraan Indonesia- Eropa Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) adalah salah satu bentuk keseriusan kepentingan Indonesia mengenai ekonomi-politik atau perdagangan sebagai jalur berdiplomasi. Alasan-alasan pemerintah indonesia berkerjasama dengan Eropa antara lain: gagalnya FTA (*Free trade area*), krisis 1998 dan di asia pada tahun 1997-1998 menimbulkan kemrosotan ekonomi yang sangat parah dan krisis kredit macet 2008 membuat diplomasi

ekonomi negara-negara seperti Indonesia berkerjasama sama dengan Eropa melalui perjanjian CEPA, sistem perjanjian yang simulasi sederhana dan statis untuk liberalisasi bilateral terhadap barang dan jasa menunjukkan keuntungan ekonomi yang positif untuk kedua mitra, saling melengkapi kekurangan antara kedua mitra (Kemenperindag, 2010)

Kerjasama Eropa-Indonesia membuat beberapa kebijakan seperti kebijakan VPA. VPA *Voluntary Partnership Agreements* adalah perjanjian mengikat antara Eropa dan Negara Mitra dimana mereka berusaha untuk menerapkan skema lisensi kayu yang kredibel untuk menghilangkan kayu yang dihasilkan secara ilegal dari perdagangan internasional dan domestik Negara Mitra. Kredibilitas VPA bergantung pada pengembangan Sistem Jaminan Legalitas (LAS). Tujuan dari LAS adalah untuk menyediakan sarana yang dapat diandalkan untuk membedakan antara hasil hutan yang diproduksi secara legal dan ilegal. Penerbitan lisensi oleh Mitra Negara memerlukan suatu sistem untuk memastikan bahwa hanya kayu yang diproduksi secara legal yang diberikan lisensi untuk ekspor. Hal ini harus mencakup pemeriksaan operasi hutan dan juga pengendalian rantai pasokan dari pemanenan untuk ekspor. Indonesia adalah negara pengekspor kayu terbesar yang telah menyelesaikan negosiasi VPA. Keberhasilan penyelesaian negosiasi diumumkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2011 oleh Komisaris Perdagangan Eropa Mr De Gucht dan Menteri Kehutanan Indonesia Bapak Hasan. Saat ini ada lima negara yang sedang mengembangkan sistem yang telah disepakati dalam VPA (Indonesia, Ghana, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Republik Kongo) dan enam negara yang

sedang bernegosiasi dengan Eropa. Dimulainya negosiasi VPA Indonesia-Eropa secara resmi diumumkan pada tahun 2007. Negosiasi dimulai di tahun 2009, mengikuti penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia yang baru dan dirilisnya proposal mengenai peraturan kayu ilegal oleh Komisi Eropa. LAS yang disepakati akan melalui suatu evaluasi teknis independen untuk mengkonfirmasi bahwa skema lisensi dapat beroperasi dengan penuh sebelum VPA dilaksanakan. (kemenperindag, 2010)

Dengan perjanjian VPA memberidakan dampak positif bagi perusahaan-perusahaan multinasional di bidang furniture seperti peningkatan pendapatan, peningkatan reputasi produk kayu Indonesia, Kontribusi terhadap tata kelola dan penegakan hukum kehutanan di Indonesia

C. Hambatan Ekspor Produk Indonesia ke Eropa

secara umum hambatan bagi perusahaan multinasional dalam mengeksport produk *furniture* adalah sama yaitu hambatan tarif dan non-tarif dan tentang peraturan standar regulasi dan persyaratan. Menjadi “perkerjaan rumah” bagi pemerintah dalam masalah tarif atau bea karena dalam sistem kapitalisme atau liberal biaya tarif seharusnya 0% tetapi pada sekarang ini masih 5% sehingga sangat memberatkan perusahaan multinasional dan terjadi ketimpangan kebijakan.

Peraturan perdagangan internasional untuk produk-produk hasil hutan terus berkembang dan dipengaruhi oleh ukuran-ukuran perdagangan yang bervariasi, diantaranya jenis produk, region, tarif impor, hambatan ekspor,

standar teknis produk, standar lingkungan dan sosial. Salah satu diantaranya adalah sertifikasi dan pelabelan produk. Setiap negara memiliki sistem standarisasi bagi produk-produk kayu yang dihasilkannya dan persyaratan kualitas produk yang akan diekspor ke negara lain. Selain itu produk yang akan digunakan di dalam negeri atau diekspor harus juga memenuhi standar lingkungan (*environmentally friendly*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang lingkungan. Pokok bahasan yang akan dikaji dalam hal ini adalah sertifikasi hutan dan ekolabeling, standard produk dan spesifikasinya, asal usul produk (*rules of origin*), dan persyaratan lingkungan bagi produk-produk yang akan diekspor ke negara-negara tujuannya (subarudin, 2008)

Peraturan-peraturan ini diperketat guna untuk menjaga lingkungan, hutan dan kerugian-kerugian sosial lainnya. Karena kita tahu bahwa setiap hari bumi (lingkungan) semakin rusak, banjir, ekosistem yang rusak, serta pemebakaran serta peneangan liar menjadi isu lingkungan yang sedang dikaji oleh dunia internasional karena hutan di Indonesia merupakan salah satu hutan terbesar di dunia setelah Brazil. (dua, 2008)

D. Peluang Ekspor Furniture Indonesia di Eropa

Profil Perdagangan *furnitur* Eropa Menurut riset pasar CSIL, Belgia sangat terbuka untuk perdagangan internasional, hampir 79% kebutuhan *furniture* Belgia dipenuhi produk asal impor (rata-rata Eropa 49%). Empat pemasok utama Belgia adalah Jerman, Cina, Belanda, dan Italia, yang secara bersama-sama memasok 68% dari total kebutuhan pasar. Pemenuhan kebutuhan *furniture*

Belgia oleh produksi nasional dan banyak faktor berbeda dari perubahan yang sederhana sampai dengan perubahan gaya hidup yang lebih mendasar menyebabkan perubahan pada permintaan Eropa terhadap *furniture*. Tren jangka panjang yang paling menarik dari sudut pandang eksportir dari negara berkembang adalah perubahan yang dinamis pada produksi di dan antara beberapa pasar utama Eropa, dan perpindahan lokasi produksi ke ekonomi berupah rendah di luar negeri (martha)

Indonesia adalah salah satu produsen kayu terbesar di dunia dan statistik ekspor properti khususnya *furniture* dari tahun-ketahun mengalami peningkatan, kebutuhan masyarakat yang semakin beragam serta perubahan globalisasi juga mempengaruhi peningkatan dipasar Eropa. Menurut prediksi dari kementerian perindustrian produk ekspor akan mengalami peningkatan 18 T hal itu disampaikan langsung oleh Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) dan pemerintah juga bekerjasama dengan bank desain dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, walaupun prediksi dari kementerian perindustrian akan mengalami peningkatan tetapi perusahaan multinasional juga harus membaca perekonomian dipasar Eropa karena pada tahun 2012 ekspor *furniture* mengalami penurunan sebesar US\$ 1,75 miliar (Rp 16,87 triliun). (perindustrian, 2017)

Pengusaha bidang *furniture* tampaknya harus pintar membaca peluang pasar, terutama menyangkut trend yang ada. Apalagi bagi mereka yang selama ini bermain di pasar ekspor. Perubahan yang begitu cepat harus diantisipasi dengan baik oleh mereka, kalau tidak mereka akan kalah saing. Misal, untuk

pasar Eropa, dewasa ini trend pasar untuk *furniture* lebih ke minimalis, sedang untuk pasar Amerika justru sebaliknya. Pasar dalam negeri kini perubahannya juga cepat, sehingga harus terus berinovasi untuk menciptakan desain terbaru. Upaya-upaya dalam rangka mendorong peningkatan ekspor produk *furniture* ini akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dengan demikian maka pemahaman terhadap potensi dan kondisi dalam.

Furniture Minimalis Diminati Pasar Dalam dan Luar Negeri, negeri serta lingkungan luar negeri akan sangat menentukan dari pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan ekspor *furniture* sebagai produk hasil hutan Indonesia ke kawasan Belgia sebagai negara tujuan ekspornya. Namun dibalik pengeksporan produk furniture tersebut pemerintah Indonesia juga dituntut untuk mencari jalan keluar supaya dapat memenuhi daya saing bagi produk *furniture*.

Untuk itu diperlukan strategi yang merupakan langkah dari kebijakan pemerintah Indonesia agar mendapatkan peluang dan sekaligus dapat melawan tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ekspor furniture Indonesia dipasar Eropa dalam upaya meningkatkan ekspornya. Dan dapat menghadapi persaingan ekspor produk *furniture* dari negara lain. Maka keunggulan komperatif dan kompetitif dari produk *furniture* perlu dijadikan bahan acuan untuk mendapatkan devisa dari sektor kehutanan hingga peluang-peluang yang ada dan tantangan yang dihadapi dapat terlaksana guna peningkatan ekspor ke luar negeri. Untuk

itu peluang yang ada dipasar Belgia ini merupakan pasar bagi produk *furniture* Indonesia ke kawasan Belgia walaupun penuh dengan tantangan.